



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional.

Kesemarakkan perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip Syariah. Diantaranya perkembangan lembaga asuransi Syariah (*takaful*).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Pasal 1

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Kontribusi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi Syariah adalah asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 Tentang Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Inilah makna dari firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Masyarakat berkembang dan peranan dari para individu di dalam sistem ekonomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomis adalah merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa kita sebut dengan risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan dari suatu kemungkinan (*probability*).²

Risiko dalam kehidupan manusia selalu melekat pada setiap kehidupan manusia. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi, dan mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko pada pihak pertama. Pengalihan dan membagi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.³

¹ QS.al-Maidah (5): 2

² Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2003) h.1.

³ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2011) h.4.

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan, badan maupun dunia usaha di Indonesia. Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan Bank Syariah. Saat ini produk asuransi syariah sangat mudah ditemukan baik di lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Salah satunya bisa kita temui pada Bank Muamalat cabang Malang dan BNI Syariah Malang. Dimana, kedua Bank ini mengcover setiap transaksi pembiayaan dengan asuransi yang disebut dengan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Asuransi ini akan dicover apabila peserta belum menyelesaikan pinjamannya.

Pada Bank Muamalat terdapat 2 (dua) jenis asuransi pembiayaan syariah yaitu Asuransi Madani Syariah dan Asuransi Avantreet Syariah. Asuransi madani syariah mengcover pembiayaan modal usaha atau kerja dan investasi sedangkan pada asuransi avantreet syariah mengcover pada pembiayaan KPR dan Pensiun. Sedangkan pada BNI Syariah Malang tidak ada pembagian dalam asuransi pembiayaan syariah.

Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada Bank Muamalat dan BNI Syariah Malang, ketika mengajukan Klaim harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kedua Bank tersebut.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram, sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan lebih besar. Demikian pula Kontribusi-Kontribusi yang terkumpul oleh suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai sarana untuk pembangunan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.⁴

Dengan telah diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung.⁵

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 bahwasanya dalam perjanjian asuransi syariah antara peserta dengan perusahaan dapat

⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum*, h.76.

⁵ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi*, h.51.

dilakukan dengan akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam perjanjian asuransi syariah ini adalah *mudharabah* sedangkan pada akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Namun di Bank Muamalat cabang Malang menggunakan akad *kafâlah*, yaitu suatu akad antara dua pihak, pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua.⁶ Sedangkan di BNI Syariah Malang menggunakan akad *wakâlah bil ujah*, yaitu salah satu bentuk akad *wakâlah* (pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan) di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan Asuransi dalam pengelolaannya mereka dengan pemberian Ujah (*fee*).⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dengan adanya perbedaan penggunaan akad dalam asuransi syariah, maka dalam hal melakukan perjanjian asuransi hingga mekanisme klaim asuransi sangatlah berbeda dan harus dibandingkan antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah. Oleh sebab itu, peneliti memilih judul:

Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad *Kafâlah* Di Bank Muamalat Dan Akad *Wakâlah Bil Ujah* Di Bni Syariah Cabang Malang

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h.433.

⁷ Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.417.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan penggunaan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah pada Bank Muamalat dan BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah pada Bank Muamalat dan BNI Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara Teoritis:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perbandingan mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah pada Bank Muamalat dan BNI Syariah.
 - d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat penelitian secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai perbandingan mekanisme klaim pada asuransi jiwa pembiayaan syariah beserta dengan penggunaan akad pada Bank Muamalat dan BNI Syariah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang mekanisme klaim pada asuransi jiwa pembiayaan syariah.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

1. Mekanisme atau prosedur adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.
2. Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
3. Polis asuransi adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi.
4. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan.

5. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. *Kafâlah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.
7. *Wakâlah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujah (*fee*).

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu MEKANISME KLAIM ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD *KAFÂLAH* DI BANK MUAMALAT DAN AKAD *WAKÂLAH BIL UJRAH* DI BNI SYARIAH CABANG MALANG. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah pada bank. Teori-teori lebih banyak diambil dari faktoryang

berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai obyek dan metode yang digunakan. Adapun faktor penelitiannya adalah memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.